



PERAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN MO'ODELO DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIKLATPIMPOLA BARU UNTUK KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Irfan Ibrahim

BPSDM Provinsi Gorontalo, Indonesia

e-mail: irfanibrgorontalo@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim Tgl.: 9 Februari 2020

Revisi Pertama Tgl.: 15 Maret 2020

Diterima Tgl.: 10 Juni 2020

Kata Kunci :

Kebijakan Diklat; Mo'odelo; Kualitas Pelayanan Publik

Keywords :

Training Policy, Mo'odelo, Public Service Quality

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh implementasi kebijakan Diklatpim IV Pola Baru terhadap kualitas pelayanan publik dimediasi oleh kompetensi kepemimpinan dengan pendekatan *mo'odelo* sebagai variabel *intervening*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode eksploratory survey. Analisis data menggunakan pendekatan PLS (*Partial Least Square*) dengan bantuan aplikasi SmartPLS 3.1. Populasi adalah seluruh Pejabat Eselon IV yang ada di Pemerintah Provinsi Gorontalo dan ASN pada Badan Diklat Provinsi Gorontalo, jumlah populasi sebanyak 520 dengan sampel sebanyak 84 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Kebijakan Diklatpim IV Pola Baru tidak berpengaruh langsung terhadap Kualitas Pelayanan Publik; (2) Implementasi Kebijakan Diklatpim IV Pola Baru berpengaruh tidak langsung terhadap Kualitas Pelayanan Publik di mediasi oleh Kompetensi Kepemimpinan dengan Pendekatan *Mo'odelo*.

Abstract

The purpose of this study was to analyze and determine the effect of the New Pattern Diklatpim (leadership education and training) IV policy implementation on the quality of public services mediated by leadership competencies with mo'odelo's approach as an intervening variable. This research uses quantitative research with exploratory survey method. The analysis using PLS (Partial Least Square) approach with SmartPLS 3.1 software. The population is all Echelon IV Officials in the Gorontalo Provincial Government and ASN at the Gorontalo Province Training Agency, with a population of 520 with a sample of 84 respondents. The results showed that: (1) the New Pattern of Diklatpim IV Policy Implementation did not directly affect on Public Services Quality; (2) the New Pattern IV Diklatpim Policy Implementation indirectly affect on Public Services quality mediated by Leadership Competence with Mo'odelo Approach.

A. PENDAHULUAN

Setiap organisasi publik terutama yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik senantiasa perlu untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan mengingat semakin hari semakin tinggi tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas dan dilakukan secara profesional. Memenuhi tuntutan akan kualitas pelayanan publik ini, organisasi pemerintahan

membutuhkan aparatur pemerintah, terutama pejabat eselon IV yang memiliki kemampuan memimpin dan mempengaruhi serta memobilisasi bawahan dalam memberikan layanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Maka untuk membentuk sosok aparatur/pejabat struktural eselon IV seperti ini, perlu diimplementasikan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) IV

Pola Baru yang memungkinkan peserta mampu melatih dan menerapkan kemampuan memimpin dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas pelayanannya.

Selain faktor implementasi Diklatpim IV Pola Baru, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik selama ini di organisasi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, dipengaruhi oleh faktor kompetensi pejabat di *level lower manager* yang merupakan manajer terdepan dalam pelayanan. Sejumlah kompetensi dibutuhkan dalam rangka penataan kegiatan pelayanan di unit kerja yang dipimpinnya.

Salah satu kompetensi yang menjadi tuntutan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan publik adalah adanya kompetensi kepemimpinan berbasis kearifan lokal sebagaimana konsep yang dikemukakan oleh Setiawan dkk (2015:31) yakni konsep Kompetensi Kepemimpinan yang mengakomodir nilai-nilai budaya/kearifan lokal.

Di daerah Gorontalo sendiri terdapat suatu karakteristik kepemimpinan berbasis kearifan lokal yang disebut dengan kepemimpinan *mo'odelo* (Botutihe, 2006:127), yang diinternalisasi sebagai sebuah kompetensi kepemimpinan pejabat struktural eselon IV sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Gorontalo.

Dengan demikian, dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Gorontalo terdapat dua aspek penting yakni aspek implementasi kebijakan Diklatpim IV Pola Baru dan aspek Kompetensi Kepemimpinan dengan Pendekatan *Mo'odelo*.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Implementasi Kebijakan Diklatpim IV Pola Baru terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Gorontalo.
2. Apakah terdapat Pengaruh Kompetensi Kepemimpinan dengan Pendekatan *Mo'odelo* terhadap Implementasi Kebijakan Diklatpim IV Pola Baru dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Gorontalo

B. METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan di 32 Organisasi Kerja Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Gorontalo selama 6 (enam) bulan dimulai pada Bulan November 2017 sampai dengan Bulan April 2018. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan metode

eksplanatori survey, yakni metode *causality research* untuk menjelaskan sebab akibat yang terjadi (Kadji, 2016:72), analisis data yang digunakan adalah analisis *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan *software SmartPLS 3,0*.

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan ASN pada Badan Diklat Provinsi Gorontalo sebanyak 54 orang dan Pejabat Struktural Eselon IV di 32 OPD yakni sebanyak 466 orang sehingga keseluruhan populasi berjumlah 520 orang, Teknik sampling menggunakan *proportional stratified random sampling* dengan jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 84 responden

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Implementasi Kebijakan Diklatpim IV Pola Baru Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Dalam pengujian hipotesis, terlihat bahwa uji hipotesis pengaruh Implementasi Kebijakan Diklatpim IV Pola Baru terhadap Kualitas Pelayanan Publik tidak signifikan pada 5% karena nilai *T-Statistic* di bawah nilai *t table* 1,96. Begitu pula dengan nilai *P-Value* sebesar 0,541 berada di atas nilai signifikansi *P-Value* < 0,05 dan nilai koefisien pengaruhnya hanya sebesar 7,9%. Oleh karena *P-Value* > 0,05 maka dengan demikian untuk uji hipotesis ini didapatkan kesimpulan bahwa H_0 diterima, H_1 di tolak atau dengan kata lain tidak terdapat pengaruh yang signifikan Implementasi Kebijakan Diklatpim IV Pola Baru terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Tidak signifikannya pengaruh Implementasi Kebijakan Diklatpim IV Pola Baru menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Diklatpim IV Pola Baru belum berkontribusi secara signifikan dalam peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan memiliki koefisien sangat rendah yakni hanya sebesar 7,9%. Hasil ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian Basir (2016), yang menunjukkan bahwa Pendidikan dan Pelatihan Pegawai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan publik dengan koefisien pengaruh sebesar 52%. Demikian pula dengan hasil penelitian Muhadi (2017) bahwa Pendidikan dan Pelatihan berpengaruh signifikan sebesar 52,7% terhadap kualitas pelayanan.

Ketidak konsistenan hasil penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan model *MSN-Approach* belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik oleh Implementor kebijakan, baik pendekatan mentalitas, sistem, maupun *networking* yang terbukti dengan hasil uji pengaruh



terhadap kualitas pelayanan publik yang tidak signifikan.

Hal ini diperkuat pula oleh hasil wawancara, menunjukkan bahwa terdapat relevansi antara hasil uji yang tidak signifikan dengan belum sepenuhnya diimplementasikannya model MSN-Approach oleh Badan Diklat Provinsi Gorontalo sebagai implementor kebijakan. Kondisi ini tidak lepas dari masih rendahnya komitmen dan motivasi dari implementor di Badan Diklat Provinsi Gorontalo, baik itu unsur manajemen diklat, widyaiswara, maupun staf pelaksanaanya.

Kurangnya komitmen dan motivasi aparatur di atas, ternyata sejalan dengan hasil analisis deskriptif jawaban responden atas angket penelitian yang item pertanyaan memiliki nilai rendah, dimana unsur implementor kebijakan Diklatpim IV Pola Baru dinilai responden masih kurang memiliki komitmen terhadap penyelesaian tugasnya. Hal ini berpengaruh kepada sikap dan perilaku implementor yang cenderung bersikap pasif dalam proses implementasi kebijakan Diklatpim IV Pola Baru. Upaya implementor hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan saja serta tidak berorientasi pada proses, akibatnya berdampak pada kurang optimalnya implementasi kebijakan Diklatpim IV Pola Baru dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Aspek ini sebagaimana ditegaskan oleh Edward III (1980:148) bahwa jika sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan rendah, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, dan sifat demokratis, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien. Demikian pula dengan Wahab (2016), menjelaskan bahwa watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis sangat menentukan optimalisasi dan efektifitas implementasi kebijakan.

Dilihat dari aspek motivasi, tidak maksimalnya implementasi kebijakan Diklatpim IV Pola Baru di atas, dapat dijelaskan sebagaimana pendapat Hasibuan (2003:141) bahwa motivasi berperan penting dalam mendorong dan menggerakkan potensi agar bekerja mencapai tujuan yang ditentukan, dimana jika dorongan keinginan bekerja ini rendah maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Oleh karena itu motivasi diperlukan dalam merangsang gairah berkerja setiap aparatur terutama aparatur di Badan Diklat Provinsi Gorontalo guna efektifitas implementasi kebijakan Diklatpim IV Pola Baru.

Oleh karena itu, peningkatan komitmen dan motivasi aparatur ini menjadi perlu dilakukan mengingat pelaksanaan Diklatpim IV Pola Baru tidak akan efektif

jika tidak didukung dengan komitmen dan motivasi dari semua pihak dalam lingkungan kebijakan tanpa terkecuali. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Weimer dan Vining (1999:396) bahwa terdapat tiga kelompok besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni:

- (1) Logika kebijakan;
- (2) Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan; dan
- (3) Kemampuan, motivasi, dan komitmen implementor kebijakan.

Sejalan dengan pendapat Weimer dan Vinning di atas, Conner (1992:146) mengemukakan bahwa keberhasilan pencapaian tujuan berakar pada komitmen, karena pada kenyataannya kebanyakan kegagalan pencapaian tujuan dapat dilacak kembali pada kurangnya komitmen.

Pengaruh Kompetensi Kepemimpinan dengan Pendekatan *Mo'odelo* terhadap Implementasi Kebijakan Diklatpim IV Pola Baru dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Uji hipotesis Pengaruh Kompetensi Kepemimpinan dengan Pendekatan *Mo'odelo* terhadap Implementasi Kebijakan Diklatpim IV Pola Baru dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, dilakukan pada dua jalur hubungan variabel yakni jalur Kompetensi Kepemimpinan dengan Pendekatan *Mo'odelo* ke Implementasi Kebijakan Diklatpim IV Pola Baru sebagai jalur hubungan pertama dan jalur Kompetensi Kepemimpinan dengan Pendekatan *Mo'odelo* ke Kualitas Pelayanan Publik sebagai jalur hubungan kedua.

Kedua jalur hubungan pengaruh ini signifikan pada 5% karena nilai *T-Statistic* berada di atas nilai *t table* 1,96. Begitu pula dengan nilai *P-Value* berada pada taraf signifikansi *P-Value* <0,05, maka didapatkan nilai uji Pengaruh Kompetensi Kepemimpinan dengan Pendekatan *Mo'odelo* terhadap Implementasi Kebijakan Diklatpim IV Pola Baru dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan nilai *T-Statistic* sebesar 9,377 signifikan pada 5% karena berada di atas nilai *t table* 1,96. Begitu pula dengan nilai *P-Value* sebesar 0,000 berada pada taraf signifikansi *P-Value* < 0,05 dan nilai koefisien pengaruhnya sebesar 68,1%.

Oleh karena *P-Value* < 0,05 maka dengan demikian untuk uji hipotesis didapatkan kesimpulan bahwa H_1 diterima, H_0 di tolak atau dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan Kompetensi Kepemimpinan dengan Pendekatan *Mo'odelo* terhadap

Implementasi Kebijakan Diklatpim IV Pola Baru dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Signifikannya Pengaruh Kompetensi Kepemimpinan dengan Pendekatan *Mo'odelo* terhadap Implementasi Kebijakan Diklatpim IV Pola Baru dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ini disebabkan oleh penerapan model *MSN-Approach* dapat diimplementasikan dengan baik, karena ditunjang oleh tingginya tingkat Kompetensi Kepemimpinan dengan Pendekatan *Mo'odelo* yang terbukti dengan hasil uji pengaruh terhadap kualitas pelayanan publik yang signifikan.

Hal ini diperkuat pula oleh hasil wawancara bahwa significannya Implementasi Kebijakan Diklatpim IV Pola Baru terhadap Kualitas Pelayanan Publik dimediasi oleh Kompetensi Kepemimpinan dengan Pendekatan *Mo'odelo*, selain diintervensi oleh implementasi *MSN-Approach* melalui penerapan kurikulum baru yang sesuai kebutuhan peserta, juga diintervensi oleh kompetensi kepemimpinan dengan pendekatan *mo'odelo* terutama kemampuan berinovasi pejabat eselon IV.

Sementara itu peran mediasi dari kompetensi kepemimpinan dengan pendekatan *mo'odelo* sebagai katalisator yang memperbesar pengaruh implementasi nilai koefisien terbesar yakni dimensi Inovator. Hal ini memberi arti bahwa dimensi inilah berperan menjadi katalisator yang memperbesar pengaruh implementasi kebijakan Diklatpim IV Pola Baru terhadap kualitas pelayanan publik. Peran dari dimensi Inovator terlihat dari peran kepemimpinan pejabat Eselon IV dalam mendorong stafnya dengan ide-ide kreatif melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Peran ini yang disebut oleh Suryanto (2016:7) sebagai Peran Agen Perubahan, yaitu peran pemimpin mendorong proses kreatif bagi aparatur untuk bergerak melakukan terobosan-terobosan guna mencapai kondisi ideal (pelayanan) yang diharapkan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pengaruh langsung secara signifikan Implementasi Kebijakan Diklatpim IV Pola Baru terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang disebabkan oleh penerapan model *MSN-Approach* dalam penyelenggaraan Diklatpim IV Pola Baru belum

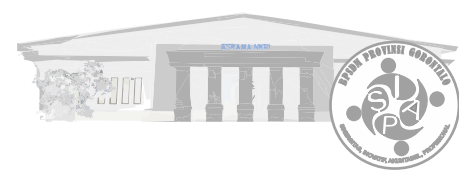
sepenuhnya diimplementasikan dengan baik yang diakibatkan oleh kurangnya komitmen dan motivasi implementor.

2. Terdapat pengaruh langsung secara signifikan Kompetensi Kepemimpinan dengan Pendekatan *Mo'odelo* terhadap Implementasi Kebijakan Diklatpim IV Pola Baru dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Hal ini disebabkan oleh penerapan kurikulum baru yang sesuai dengan kebutuhan peserta diklat serta tingginya tingkat Kompetensi Kepemimpinan dengan Pendekatan *Mo'odelo* terutama kemampuan berinovasi aparatur yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik di Pemerintah Provinsi Gorontalo.

E. REKOMENDASI

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat dikemukakan rekomendasi penelitian ini khususnya kepada Badan Diklat Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efektifitas Kebijakan Diklatpim IV Pola Baru dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, maka disarankan kepada Badan Diklat Provinsi Gorontalo meningkatkan komitmen dan motivasi para implementor kebijakan Diklatpim IV Pola Baru melalui kegiatan membangun komitmen bersama dan mengikut sertakan para implementor pada berbagai diklat pengembangan kompetensi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Disamping itu, disarankan juga untuk meningkatkan motivasi implementor melalui pemberian tambahan penghasilan dari anggaran upah pungut atas pembayaran kontribusi pelaksanaan diklat di Badan Diklat Provinsi Gorontalo.
2. Untuk meningkatkan efektifitas Kebijakan Diklatpim IV Pola Baru dalam upaya meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, disarankan kepada Badan Diklat Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan peran mediasi kompetensi kepemimpinan dengan pendekatan *mo'odelo* melalui pengembangan kurikulum maupun muatan mata diklat yang diperkaya dengan kompetensi kepemimpinan berbasis kearifan lokal, disarankan juga untuk meningkatkan kemampuan berinovasi di sektor pelayanan publik bagi pejabat eselon IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui diklat-diklat kepemimpinan maupun diklat-diklat pengembangan inovasi aparatur.



F. DAFTAR PUSTAKA

- Basir, M. Askal. 2016. *Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan, Motivasi Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan Dinas Kependudukan dan Capil Kota Baubau*. [Jurnal]: Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton Vol.1 No.1 April 2016. Pp:35-45
- Botutihe, Medi. 2006. *Mo'odelo: Sifat dan Perilaku Pemimpin Berdasarkan Nilai Lokal Gorontalo*. Gorontalo: Pustaka Gorontalo.
- Conner, Daryl R. 1992. *Managing At The Speed Of Change*. New York: Villard Books, Random House, Inc.
- Edward III, George, 1980, *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press.
- Kadji, Yulianto. 2016. *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Muhadi. 2017. *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelatihan dan Pengalaman Kerja Terhadap Peningkatan Kinerja Pelayanan Kepala Urusan (KAUR) di Desa (Studi pada Desa se Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*. Tesis. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Setiawan, dkk. 2015. *Pengaruh Kepemimpinan Pelayan Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Bekasi*. Proceeding Seminar Psikologi dan Kemanusiaan. Malang: Psychology Forum UMM.
- Suryanto, Adi. 2016. *Sistem Pengembangan Kader Pimpinan ASN: Sebuah Strategi Resolusi Percepatan Reformasi Birokrasi di Indonesia*. Jurnal Pendayagunaan Aparatur Negara Vol.VI Tahun 2016.
- Wahab, A Solichin. 2016. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Weimer, David, L. and Vining, Aidan. R.1999. *Policy Analysis: Concepts and Practice*. New Jersey: Prentice Hall, Third Edition